

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi, diukur dari perubahan aspek lain dalam perekonomian seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, perkembangan kemahiran tenaga kerja, dan kenaikan taraf dalam kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah pada dasarnya merupakan suatu proses dimana hubungan antara berbagai variabel diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal dan lain-lain. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam pembangunan adalah melaksanakan pembangunan itu sendiri dengan para pekerja khususnya dengan tenaga kerja penduduk Indonesia mencapai sebesar 264 jiwa pada tahun 2017. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, pelaku pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan ekonomi itu sendiri (Sukirno, 2013).

Keberhasilan ekonomi pembangunan di negara berkembang dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Indonesia juga sebagai negara berpendudukan terbesar kelima di dunia, dengan jumlah penduduk sebesar 264 juta jiwa pada tahun 2017, serta negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar dan menjadi potensi besar dalam menggerakkan perubahan pembangunan ekonomi. Tujuan dari proses pembangunan adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang-barang kehidupan pokok,

meningkatnya standar hidup (penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan pendidikan) dan perluasan pilihan–pilihan ekonomis dan sosial. Perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara yang bergantung dengan kuantitas penduduk yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan sebagian pada nilai atas produk tersebut. Pembangunan ekonomi juga merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk menggerakkan kegiatan ekonomi sebagai implikasi dari perkembangan mulai kesempatan kerja akan bertambah, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi dalam perekonomian negara (Sukirno,2006).

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah yang ramah ketenagakerjaan (*employment growth friendly*) harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penanggulangan masalah pengangguran dan pekerja miskin dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif.

Hingga saat ini, isu strategis ketenagakerjaan yang masih dihadapi prov Jawa Tengah adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan penambahan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jawa Tengah, juga turut terpengaruh oleh kondisi tersebut. kondisi ketenagakerjaan di Kab/Kota Prov Jawa Tengah dapat dilihat melalui tabel berikut

Tabel 1.1

Kondisi Umum Ketenagakerjaan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa 2017-2021

Tahun	kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Angkatan Kerja (JUTA)	Penduduk Yang Bekerja (JUTA)	Persentase Antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk yang bekerja
2021	Kabupaten cilacap	83.004.300	74.732.900	90,03
2021	Kabupaten Banyumas	86.598.200	81.359.200	93,95
2021	Kabupaten Purbalingga	50.368.200	47.323.200	93,95
2021	Kabupaten Banjarnegara	49.974.100	47.046.000	94,14
2021	Kabupaten Purworejo	62.012.700	58.271.900	93,97
2021	Kabupaten Kebumen	41.529.900	40.040.100	96,41
2021	Kabupaten wonosobo	42.805.300	40.552.600	94,74

2021	Kabupaten Magelang	77.458.900	73.561.300	94,97
2021	Kabupaten Boyolali	58.994.100	55.993.200	94,91
2021	Kabupaten klaten	63.124.500	59.666.100	94,52
2021	Kabupaten Sukoharjo	49.325.800	47.686.700	96,68
2021	Kabupaten wonogiri	57.302.500	55.909.300	97,57
2021	Kabupaten Karanganyar	51.778.700	48.727.000	94,11
2021	Kabupaten Sragen	50.775.200	48.359.200	95,24
2021	Kabupaten Grobogan	78.303.500	74.871.800	95,62
2021	Kabupaten Blora	48.552.500	46.701.800	96,19
2021	Kabupaten Rembang	36.202.000	34.872.700	96,33
2021	Kabupaten Pati	69.442.700	66.249.200	95,40
2021	Kabupaten Kudus	52.109.400	50.144.300	96,23
2021	Kabupaten Jepara	68.728.400	65.820.800	95,77
2021	Kabupaten Demak	59.511.100	56.370.800	94,72
2021	Kabupaten Semarang	63.004.000	59.841.300	94,98
2021	Kabupaten Temanggung	45.492.700	44.300.900	97,38
2021	Kabupaten kendal	53.403.000	49.373.200	92,45
2021	Kabupaten Batang	43.069.000	40.232.000	93,41
2021	Kabupaten Pekalongan	48.624.800	46.546.000	95,72
2021	Kabupaten Pemasang	64.510.300	60.181.500	93,29
2021	Kabupaten Tegal	71.584.500	64.449.900	90,03
2021	Kabupaten Brebes	87.925.800	79.328.900	90,22

	Kota			
2021	Kota Magelang	6.608.600	6.031.700	91,27
2021	Kota Surakarta	28.217.800	26.002.500	92,15
2021	Kota Salatiga	11.212.400	10.397.900	92,74
2021	Kota Semarang	103.479.400	93.607.600	90,46
2021	Kota Pekalongan	18.121.000	16.872.500	93,11
2021	Kota Tegal	13.244.000	12.151.000	91,75

Sumber: data diambil dari Badan Pusat Statistik.

Tabel diatas menunjukkan data mengenai kondisi umum ketenagakerjaan kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021. Terlihat dari data persentase tersebut bekerja mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Lebih dari 80 persen angkatan kerja di provinsi- provinsi yang ada di kab/kota provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 ialah penduduk yang bekerja dengan demikian Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya pengangguran di kab/kota Provinsi Jawa Tengah.

Penyerapan tenaga kerja memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi beberapa negara, terutama negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan terciptanya pembangunan ekonomi yang baik, suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi memiliki sebuah tujuan dalam penyediaan lapangan pekerjaan agar dapat mengikuti pertumbuhan dari jumlah penduduk hingga angkatan kerja, yang mana pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan atau lapangan pekerjaan. Manusia sebagai salah satu

pelaku dari kegiatan pembangunan akan selalu terlibat dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lainnya. Selain itu dengan kondisi penyerapan tenaga kerja yang baik, dapat membantu masalah ketenagakerjaan yaitu dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada dan dapat mengurangi kemiskinan dan kriminalitas yang ada.

Jumlah penduduk besar untuk beberapa hal bisa dianggap sebagai hal positif, dimana jumlah penduduk tersebut dapat menjadi subjek dalam pembangunan, perekonomian pun dapat berkembang apabila memiliki tenaga kerja yang banyak. Akan tetapi, hal tersebut bisa juga menjadi beban dalam pembangunan apabila lapangan kerja yang ada tidak sesuai atau seimbang dengan besarnya jumlah penduduk. Situasi tersebut hanya akan menimbulkan masalah dimana penduduk yang telah memasuki usia kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja yang tidak cukup tersebut merupakan fenomena yang umumnya akan dihadapi dalam masalah ketenagakerjaan seiring bertambahnya angkatan kerja.

Indonesia termasuk salah satu dari berbagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Dengan keadaan tersebut, Indonesia pastinya akan menghadapi masalah dalam tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkat, bisa pula pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja yang terus meningkat harus dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja pula. Jumlah angkatan yang besar dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja hanya akan menimbulkan masalah yaitu berkurangnya kesempatan kerja, dan semakin banyak

penduduk usia kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan.

Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi berbagai masalah mengenai tenaga kerja. Selama tahun 2000 – 2021, tenaga kerja provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 hingga tahun 2021, jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik Prov Jawa Tengah, tingkat partisipasi tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 69,11 persen, keadaan ini terjadi tidak lepas dari adanya peran pemerintah dalam mengawasi dan melakukan pengelolaan terhadap berbagai masalah mengenai ketenagakerjaan yang ada di provinsi Jawa Tengah. Tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja terendah terjadi di tahun 2015. Pada tahun 2015, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tingkat partisipasi tenaga kerja tercatat sebesar 67,87 persen. Namun setelah itu tingkat partisipasi tenaga kerja terus mengalami fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya. Fluktuasi ini disebabkan oleh salah satu faktor dalam perekonomian yaitu kondisi sumber daya manusia yang rendah, disertai dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan naik dan turunnya kondisi penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah seperti, kondisi dari pertumbuhan ekonomi, upah, PDRB, pendidikan, investasi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan situasi ekonomi suatu negara melalui perubahan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan suatu komoditi dan pada jangka waktu tertentu. Dalam pertumbuhan ekonomi juga memerlukan unsur investasi. Investasi sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan

kapasitas produksi ataupun jumlah industri. peningkatan investasi ini sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap hasil produksi baik permintaan dari dalam negeri. Permintaan tersebut merupakan pasar dan hal ini berpengaruh pada jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi, (Dharma & Djohan, 2015).

Menurut Arin Luthita Anna Mathovani (2019), PDRB menjadi cerminan dari pertumbuhan ekonomi, jika PDRB mengalami peningkatan maka kesempatan kerja juga akan meningkat. PDRB dapat mempengaruhi situasi ketenagakerjaan dengan asumsi bahwa jika nilai PDRB meningkat, jumlah penjualan atau produksi di berbagai unit ekonomi juga akan meningkat. Jika hasil produksi perusahaan meningkat, maka penambahan tenaga kerja dapat dilakukan oleh perusahaan guna agar kegiatan produksi dapat mengikuti peningkatan penjualan.

Menurut Atifatur (2018) upah adalah imbalan dari hasil kerja yang dilakukan seseorang kepada perusahaan. Meningkatnya upah ditandai dengan adanya kenaikan jumlah permintaan barang dan jasa, oleh sebab itu naiknya jumlah permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan jumlah dari produksi dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang didasari oleh kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yaitu meliputi tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, di mana penyesuaiannya dilakukan setiap tahun. Penyesuaian upah

minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. Dalam hal UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMP Meningkatnya upah ditandai dengan adanya kenaikan jumlah permintaan barang dan jasa, oleh sebab itu naiknya jumlah permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan jumlah dari produksi dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Selain kebijakan menaikkan upah, banyak beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menangani masalah ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan investasi, karena investasi secara tidak langsung juga dapat menaikkan kapasitas produksi dengan meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan tentu akan berdampak pada penambahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut teori Keynes mengatakan bahwa cara mengurangi pengangguran yaitu dengan memperbanyak investasi misalnya mesin karena mesin membutuhkan operator sehingga secara langsung ataupun tidak akan menyerap tenaga kerja dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Menurut Syahyunan (2015), investasi adalah perjanjian pemberian sejumlah modal atau dalam bentuk sumber daya lain yang telah disepakati pada saat itu juga, dengan memiliki tujuan dalam memperoleh laba atau pendapatan dimasa mendatang. Kehadiran investasi mampu menciptakan sebuah modal baru bagi perusahaan sehingga dapat menghasilkan atau menambah faktor produksi yang baru seperti menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja hingga

membantu mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009).

Upah minimum provinsi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Upah berpengaruh terhadap kondisi dari permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah minimum merupakan pedoman bagi pengusaha dalam membayar upah kepada karyawannya. Upah minimum di suatu provinsi ditentukan oleh dewan pengupah, yang terdiri dari gubernur masing-masing provinsi. Tingkat upah merupakan salah satu alasan atau faktor penting bagaimana seseorang memberikan kontribusi terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Pada umumnya, upah minimum dan kesempatan kerja di tiap daerah berbeda beda. Karena hal tersebut, seseorang akan mencari daerah dan berpindah tempat, dimana terdapat pekerjaan dengan upah yang dirasa cukup besar dan layak hingga dapat memenuhi kebutuhannya. Namun hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan di suatu tempat, sehingga kesempatan kerja yang ada menjadi berkurang. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan yaitu dengan mengupayakan menciptakan lapangan pekerjaan secara merata di Indonesia.

Adapun besaran perkembangan dari upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 dari tahun 2016 hingga 2019 yang didapatkan dari BPS Provinsi Jawa Tengah, perkembangan UMP di Prov Jawa Tengah tiap tahunnya meningkat. Peningkatan ini dapat dikatakan cukup pesat, dimana pada tahun 2016 berkisaran sebesar Rp.1.265.000 dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 sebesar Rp.1.605.396. Dewan Pengupah harus lebih memperhatikan situasi para tenaga

kerja secara keseluruhan dan berbagai faktor produksi untuk menetapkan upah yang baik. Terdapat sebuah pernyataan dari Gie (1999: 569) menyatakan bahwa harus adanya batasan minimum upah para buruh, negara berkembang tidak dapat sewenang-wenang untuk menentukan upah buruh serendah mungkin.

Pada umumnya upah akan terus mengalami kenaikan seiring semakin canggih dan berkembangnya zaman yang mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa serta biaya hidup yang semakin besar. Tingkat upah minimum provinsi yang tinggi dapat menjadi alasan yang menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Di sisi pencari kerja, semakin tinggi upah minimum di suatu daerah, semakin banyak pencari kerja yang berusaha mencari pekerjaan di daerah tersebut. Namun jika dari sisi perusahaan, penetapan tingkat upah yang tinggi dapat menjadi salah satu alasan bagi perusahaan untuk membatasi tenaga kerjanya.

Jika tingkat upah meningkat maka akan menaikkan biaya produksi dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan biaya hasil produksi. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli konsumen, sehingga konsumen akan mengurangi mengkonsumsi barang tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan akan memilih untuk mengurangi dan membatasi dalam penyerapan tenaga kerja dibutuhkan (Sumarsono, 2009). Dan sebaliknya jika upah menurun, maka penyerapan tenaga kerja akan menjadi bertambah. Namun kondisi tersebut juga akan memaksa seseorang untuk memenuhi kebutuhan dengan mencari dan memperoleh pekerjaan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Latri Wihastuti dan Heni Rahmatullah,(2018) yang mana hasilnya menunjukkan bahwa upah minimum provinsi bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Natalia Sihombing (2017), terdapat hasil yang berbeda dimana dalam penelitiannya upah minimum memiliki hubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, pemerintah memberikan perhatian lain terhadap suatu hal yaitu PDRB, yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang diciptakan oleh semua sektor ekonomi di suatu daerah. PDRB dapat mempengaruhi jumlah dari angkatan kerja untuk bekerja. Hal ini dapat terjadi apabila diasumsikan nilai PDRB meningkat, sehingga dapat diartikan bahwa terjadinya peningkatan terhadap nilai output penjualan dari berbagai unit sektor perekonomian di suatu wilayah. Semakin tinggi jumlah penjualan, maka perusahaan akan berusaha untuk merekrut tenaga kerja agar mampu mengiringi jumlah produksi yang meningkat dikarenakan penjualan yang meningkat.

Menurut Habiburrahman (2012), Kenaikan PDRB mempunyai kemampuan yang besar dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja serta mampu menunjukan lapangan kerja/kesempatan kerja yang lebih luas. Kemudian berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan teori Keynes dalam Boediono (1998), menyatakan bahwa pasar tenaga kerja mengikuti apa yang terjadi di pasar barang.

Gambar 1.2
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah (2013-2021)



Sumber : kementerian PPN/Bappenas

Pada Provinsi Jawa Tengah, perkembangan PDRB baik atas dasar harga berlaku tiap tahunnya mengalami kenaikan, sebelumnya pada tahun 2019 nilai PDRB sekitar 28,2 juta dan tahun 2020 PDRB Jawa Tengah turun menjadi 26,1 juta, pada tahun 2019 PDRB tertinggi . Kondisi ini disebabkan karenalumpuhnya berbagai

macam lapangan usaha selamasituasi pandemi covid-19 mengakibatkan terjadinya pembatasan sosial berskala besar atau biasa dikenal dengan PSBB dan berbagai macam aturan pemerintah untuk menanggulangi covid-19.

Dari latar belakang untuk mengetahui apakah ada pengaruh upah minimum Kabupaten/Kota, PDRB dan investasi terhadap Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Sumatera Barat, maka peneliti membahas mengenai “Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2017- 2021”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perlu adanya identifikasi masalah penelitian agar penelitian yang dilaksanakan memiliki ruang lingkup yang jelas. Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Tidak seimbangnya peningkatan angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja, dimana peningkatan angkatan kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja.
2. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi.
3. Persentase pekerja tidak penuh masih tinggi.
4. Kenaikan upah dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, namun hal tersebut juga dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja.
5. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja

6. Pertumbuhan produk domestik regional bruto di Sumatera barat mengalami perlambatan.
7. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Objek penelitian yang dipilih adalah penyerapan tenaga kerja Provinsi-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 -2021.
2. Penelitian ini merupakan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja diantaranya upah, permintaan pasar akan hasil produksi, harga barang modal, modal, teknologi dan kualitas tenaga kerja, namun dalam penelitian ini dibatasi masalah bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2017 -2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 -2021?

2. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 -2021?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi- Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 -2021?
4. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, PDRB dan investasi secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017- 2021?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 -2021.
2. Mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 -2021.
3. Mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi- Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 -2021.
4. Mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, PDRB, investasi secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 -2021.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan tenaga kerja yaitu pengaruh upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

2. Praktik

a. Bagi Peneliti

- 1) Peneliti memperoleh pengetahuan praktis terkait ilmu ekonomi sumber daya manusia.
- 2) Dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memahami kondisi ketenagakerjaan provinsi yang ada di Sumatera barat, khususnya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Serta sebagai masukan bagi perencana pembangunan dalam merumuskan perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan terutama dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja.

c. Bagi Akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembaca sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.